

**RESISTENSI MASYARAKAT ADAT RENDU
TERHADAP PEMBANGUNAN WADUK LAMBO
DI DESA RENDUBUTOWE KECAMATAN AESESA SELATAN
KABUPATEN NAGEKEO**

Maria Anjelina Azi¹, Samingan², Bonaventura R. Seto Se³

Pendidikan Sejarah Universitas Flores¹²³

mariaanjelinaazi29@gmail.com¹, saminganhistoriasocialstudies²,
nailaputri112@gmail.com³

Abstrak

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apa Latar Belakang Resistensi Masyarakat Adat Rendu Terhadap Pembangunan Waduk Lambo? 2) Bagaimana Proses Resistensi Masyarakat Adat Rendu Terhadap Pembangunan Waduk Lambo? 3) Bagaimana Solusi Mengatasi Resistensi Masyarakat Adat Rendu Terhadap Pembangunan Waduk Lambo?. Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui apa latar belakang resistensi masyarakat adat Rendu terhadap pembangunan waduk Lambo. 2) Untuk mengetahui bagaimana proses resistensi masyarakat adat rendu terhadap pembangunan waduk lambo. 3) untuk mengetahui bagaimana solusi untuk mengatasi resistensi masyarakat adat rendu terhadap pembangunan waduk lambo. Penelitian ini menggunakan metode sejarah. subjek dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci dan informan pendukung. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) Pengumpulan Data, 2) Reduksi data, 3) Penyajian data 4) Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa waduk merupakan bendungan yang di buat oleh manusia dengan maksud untuk menampung air yang nantinya dimanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Waduk ini memiliki banyak manfaat bagi masyarakat itu sendiri yaitu: 1) penyediaan air baku, 2) air irigasi persawahan 3) budidaya ikan air tawar, dan 4) pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Untuk pembangunan waduk tersebut, membutuhkan tanah sebagai lahan

pembangunan waduknya. Akan tetapi, tanah-tanah ini umumnya milik masyarakat, sehingga pemerintah harus melakukan pembebasan.

Kata Kunci: Resistensi, Masyarakat, Adat, Pembangunan, Waduk Lambo

PENDAHULUAN

Pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat petani, berupaya melaksanakan pembangunan di bidang pengairan melalui penyediaan sarana air baku. Penyediaan air baku ini, antara lain melalui pengembangan sumber air buatan berupa bendungan atau waduk. Waduk merupakan bendungan yang sengaja dibuat oleh manusia dengan maksud untuk menampung air yang nantinya dimanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Waduk ini memiliki banyak manfaat bagi masyarakat itu sendiri yaitu (1) penyediaan air baku, (2) air irigasi persawahan, (3) budidaya ikan air tawar, dan (4) pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Untuk pembangunan waduk tersebut, membutuhkan tanah sebagai lahan pembangunan waduknya. Akan tetapi, tanah-tanah ini umumnya milik masyarakat, sehingga pemerintah harus melakukan pembebasan. (Missingham 2003:44)

Pembebasan tanah untuk pembangunan harus dilakukan dengan cara musyawarah yang setara antara pemilik tanah dan pihak pembebas (pemerintah), pengawasan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah (bupati/walikota) (Hutahalung, 2005:153). Ketentuan tentang pengadaan tanah untuk pembangunan diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Penetapan kawasan konservasi ataupun pembangunan infrastruktur, khususnya waduk sering kali mengalami perlawanan dari masyarakat. Masyarakat yang berhadapan dengan pengusiran biasanya punya pandangan jelas tentang apa yang mereka tolak, yakni hilangnya komunitas dan sumber

kehidupan. Pengusiran di satu lokasi bisa menyatukan perlawanan lintas kelas dan suku karena bentuk eksklusi ini bersifat langsung dan menghancurkan, dan ribuan orang secara bersamaan terancam oleh satu sumber terancam oleh satu sumber ancaman. Perlawanan terhadap pengusiran dapat meluas dengan cepat ketika wacana legitimasi yang digunakan mendapatkan sumber dan dukungan dari gerakan masyarakat hak asasi manusia dan pelestarian lingkungan di tingkat nasional dan internasional. Perlawanan itu semakin menggema bila disuarakan oleh jaringan aktivitas mahasiswa, dan lembaga-lembaga donor yang menghubungkan kasus-kasus di tingkat lokal dan masalah di tingkat kekerasan fisik dalam proyek-proyek pembangunan skala besar yang juga dipenuhi dengan kepentingan sebagian orang (Hall et al, 202). Eksklusi sosial bukanlah hal baru yang terjadi di masyarakat. Dalam kasus infrastruktur, masyarakat sekitar lokasi pembangunan sering terjadi konflik sosial. Hal ini menyebabkan masyarakat mengalami kehilangan tanah dan sumber daya kehidupan serta beberapa masalah lainnya. Sehingga yang terjadi adalah penolakan pembangunan oleh masyarakat setempat. Penolakan yang terjadi berupa perlawanan yang dilakukan masyarakat dalam hal ini pembangunan infrastruktur, khususnya bendungan ataupun waduk. Walaupun banyak penolakan dari masyarakat, pembangunan waduk pun tetap dilanjutkan akan tetapi, masyarakat adat yang menempati tanah ulayat yang menjadi dampak pembangunan waduk antara lain; Rendu, Ndora, dan Lambo yang tergabung dalam 3 desa yakni desa Rendu Butowe, kecamatan aesesa selatan, desa Labolewa, kecamatan Aesesa dan desa Ulupulu, kecamatan Nangaroro tetap menolak rencana pembangunan di lahan pertanian milik mereka. Masyarakat menilai bahwa dibalik pemerintah namun akan mengakibatkan (a) terdapat memarjinalisasi yang dapat mengancam tatanan sosial budaya serta keberlangsungan hidup mereka, (b) bentuk upaya perampasan ruang hidup, karena pembangunan mega proyek infastruktur waduk ini akan menenggelamkan lahan produktif dan perkampungan mereka. Timbulnya perlawanan masyarakat terkait dengan pembangunan waduk lambo karena tanah atau lahan yang digunakan dalam pembangunan waduk tersebut berstatus tanah ulayat yang

kepemilikannya secara komunal oleh 3 suku yang berada di Desa Rendubutowe yaitu Suku Isa, Suku Gaja, dan Suku Redu.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif, Istilah penelitian kualitatif juga diungkapkan oleh Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010: 4) menjelaskan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang mendapati data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

PEMBAHASAN

Rencana pembangunan waduk Lambo pernah diusulkan ditahun 1999 sampai tahun 2000 pada masa pemerintahan kabupaten ngada dilakukan *supporting work's* studi kelayakan bendungan (waduk) yang diberi nama waduk Mbay. Kemudian masuk detail desain bendungan Mbay pada tahun 2001-2002, berdasarkan hasil pekerjaan detail desain bendungan Mbay luas genangan yang direncanakan 309,43 hektar are dan ketinggian permukaan air yang direncanakan pada elevasi 410.40 meter. PT. Indra Karya Persero, Cabang Kupang yang bekerja sama dengan PT. Wiranta Bhuana Raya dan PT. Arcende dengan proyek pengembangan dan konservasi sumber air flores, kontrak nomor KU.08.08-W26/PKSA.F-01/01/2001, tanggal 30 April 2001 (Jacob Wadu: 2018).

Hal ini direncanakan karena kawasan Mbay terletak di Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan luas jangkauan air pada sungai Aesesa sebesar 1.200 km² melewati dataran Mbay dengan penegembangan daerah irigasi potensial 5.200 Ha. Namun saat itu masyarakat 100 % menolak pembangunan waduk Lambo/Mbay yang sudah melakukan tahap survei tersebut. Masyarakat memepertahankan tanah ulayat dan pertimbangan kehidupan kedepan. Ditahun 2004 melalui forum penolakan yang diketahui oleh bapak Alm. Stanis Paso dengan beranggotakan tokoh masyarakat dari ketiga desa yaitu desa Rendu Butowe, Ulupulu, dan Labolewa. Adapun alasan penolakan yaitu;

pemerintah tidak melakukan sosialisasi mengenai tujuan pembangunan waduk Mbay/Lambo, tidak ada pemberitahuan kepada pemerintah desa mengenai survei pembangunan wadyk Mbay/Lambo, dan hampir tanpa survei sudah berjalan masyarakat tidak mengetahui alasan dari tahapan survei tersebut. Pada saat ditahun 2004 pembangunan waduk Mbay/Lambo diberhenti total dan pembangunan bendungan (waduk) dialihkan ke Mars Sulawesi Selatan.

Latar Belakang Resistensi Masyarakat Adat Rendu Terhadap Pembangunan Waduk Lambo

Kurangnya Sosialisasi Rencana Pembangunan Waduk Lambo Kepada Masyarakat Di Desa Rendu Butowe

Setiap kegiatan pembangunan termasuk pembangunan waduk yang akan dilaksanakan perlu adanya sosialisasi berulang-ulang kepada masyarakat, agar mereka dapat memahami maksud dan tujuan serta manfaat dari pembangunan tersebut. Dalam sosialisasi tersebut perlu dijelaskan kepada masyarakat, seperti ganti untung atas lahan milik yang dibebaskan, berbagai tanaman yang di atas lahan tersebut, rumah-rumah masyarakat yang akan di gusur, bagaimana denagn masyarakat yang harus direlokasi, tempat-tempat ritual adat, dan kuburan-kuburan nenek moyang mereka.

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Kepada Masyarakat Yang Kurang Tepat

Sosialisasi saja ternyata tidak cukup bagi masyarakat supaya dapat memahami tentang manfaat dari pembangunan tersebut dan berbagai hal yang berkaitan dengan hak-hak mereka seperti ganti untung, relokasi masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk Lambo. Akan tetapi juga perlu pendekatan khusus atau pendekatan budaya. Dalam pembangunan waduk Lambo ini sejak awal masyarakat di lokasi rencana pembangunan waduk ini tida dilibatkan secara aktif oleh pemerintah daerah baik Pemerintah Daerah Ngada pada tahun 2001 yang lalu maupun pemerintah Daerah Nagekeo tahun 2015.

Hilangnya Tempat Tinggal Masyarakat Desa Rendu Butowe

Rencana pembangunan Waduk Lambo akan menenggelamkan seluruh wilayah Dusun Malapoma di Desa Rendu Butowe. Oleh karena itu, 71 kepala keluarga akan kehilangan tempat tinggal, sehingga harus direlokasi dan 47 buah pemukiman warga akan tenggelam. Kemudian, juga akan kehilangan lahan produktif (sawah dan kebun), serta tanaman umur panjang seperti jambu mente, kemiri dan sebagainya. Demikian juga dengan sarana dan prasarana umum (gereja/kapela, SD, SLTP, Posyandu, Polindes). Perkuburan nenek moyang dari Suku Redu 10 (sepuluh) buah perkuburan, Suku Gaja 8 (delapan) buah perkuburan, dan Suku Isa 5 (lima) buah perkuburan.

Hilangnya Lahan Produktif Untuk Bertani dan Berkebun

Pembangunan waduk Lambo membutuhkan lahan yang sangat luas 431,92 ha, sehingga otomatis banyak lahan masyarakat yang hilang atau beralih fungsi. Banyaknya lahan masyarakat yang beralih fungsi menjadi area genangan waduk Lambo tanpa ada kejelasan mengenai ganti untung lahan-lahan milik masyarakat seperti sawah, kebun yang selama ini sumber penghidupan masyarakat setempat. Lahan-lahan ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat setempat sebagai petani. Karena sawah dan kebun merupakan lahan yang digunakan para petani untuk menopang kehidupan mereka secara turun-temurun.

Proses Resistensi Masyarakat Adat Rendu Terhadap Pembangunan Waduk Lambo

Membentuk Forum Penolakan Pembangunan Waduk Lambo (FPPWL)

Berberapa tokoh dan kalangan masyarakat yang kritis berinisiatif menyikapi wacana pembangunan waduk Lambo ini dengan membentuk kembali forum penolakan yang dinamai Forum Penolakan Pembangunan Waduk Lambo (FPPWL). Forum ini dibentuk pada tanggal 23 Agustus 2015, dua bulan setelah mengikuti kegiatan pertemuan perdana di Kantor

Bupati. Forum ini juga sebenarnya merupakan reinkarnasi dari Forum Perjuangan Penolakan Pembangunan Waduk Mbay (FPWM) yang pernah dibentuk pada tahun 1999-2002.

Aksi Menghadang Proses Peninjauan Lokasi

Protes masyarakat terhadap rencana pembangunan waduk Lambo kemudian berkembang menjadi aksi perlawanan. Awal lainnya perlawanan masyarakat terjadi saat proses peninjauan lokasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo. Pihak pemerintah beranggapan bahwa, meskipun sejak awal diprotes dan ditolak oleh masyarakat, pemerintah tetap melanjutkan rencana pembangunan dengan harapan sikap protes dan penolakan tersebut akan bisa diteknikalisasi dengan berbagai negosiasi dan persuasi saat proses peninjauan lokasi.

Menolak Dan Mengacaukan Proses Sosialisasi

Meskipun sejak awal diprotes dan ditolak oleh masyarakat, Pemerintah Kabupaten Nagekeo tetap melanjutkan rencana pembangunan ke tahap sosialisasi. Kegiatan sosialisasi diselenggarakan pada tanggal 18-19 April 2016. Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo selalu menekankan bahwa kebijakan ini lahir dari niat baik pemerintah untuk membangun daerah. Bahwa pembangunan waduk Lambo ini mempunyai tujuan mulia, jika manfaat negatifnya lebih banyak dari pada manfaat positifnya tentu saya sebagai Bupati akan melihat ulang rencana pembangunan waduk Lambo ini.

Menghadang Dan Memblokir Lokasi Pembangunan Saat Proses Survei

Walaupun proses sosialisasi senantiasa dihalau dengan aksi berlawanan, Pemerintah Daerah terus berupaya untuk melakukan proses survei terjadi pada tanggal 6 dan 7 Juni 2016. Sehari sebelumnya, tanggal 5 Juni 2016, Bupati Nagekeo mengutus beberapa pejabat daerah yang berasal dari Rendu Butowe untuk menyampaikan bahwa kegiatan survei akan segera dilaksanakan. Keesokan harinya tanggal 16 Juni 2016, tim

survei di bawah pemimpin Asisten satu bersama Satpol PP, TNI dan Polri bersenjata lengkap memaksa masuk ke lokasi pembangunan untuk melakukan kegiatan survei.

Solusi Dalam Mengatasi Resistensi Masyarakat Adat Rendu Terhadap Pembangunan Waduk Lambo

Upaya pemerintah dalam menangani resistensi masyarakat adat Rendu terhadap pembangunan waduk Lambo ialah:

1. Mengadakan Rapat dan Pertemuan

Setelah aksi penghadangan itu, selanjutnya berbagai aktifitas rapat dan pertemuan yang membahas tentang penolakan mega proyek pembangunan waduk Lambo terus dilakukan. Pada tanggal 27 Maret 2016, rapat terbuka seluruh masyarakat desa Rendu Butowe, membangun kesepakatan menolak lokasi pembangunan waduk Lambo. Selanjutnya tanggal 14 April 2016, forum penolakan pembangunan waduk Lambo mendesak pemerintah desa Rendu Butowe dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rendu Butowe melakukan musyawarah dengan agenda persamaan persepsi menanggapi wacana pembangunan waduk Lambo.

2. Melakukan Diskusi Dengan LSM

Pada tanggal 16 Oktober 2016 masyarakat desa Rendu Butowe mengikuti kegiatan diskusi awal yang difasilitasi oleh AMAN Nusa Bunga- Flores. Kegiatan di selenggarakan di Kantor Desa Rendu Butowe. Kegiatan diskusi tersebut melibatkan semua unsur baik itu tokoh masyarakat adat Rendu Butowe, Ulupulu dan Labolewa, serta segenap elemen masyarakat adat mendapat pendidikan politik dari tim AMAN Nusa Bunga yang menyampaikan tentang keberadaan masyarakat dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan sektoral, perubahan hukum ditingkat nasional, kesepakatan-kesepakatan masyarakat adat bersama Presiden Jokowi dalam Nawacita.

3. Mengikuti Kegiatan Pelatihan Paralegal

Selain melakukan diskusi, masyarakat juga mengikuti pelatihan paralegal. Pelatihan ini yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Nusa Tenggara (LBH Nusra) dan AMAN Nusa Bunga pada tanggal 3 November 2016. Pelatihan paralegal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang hukum dan hak-hak masyarakat, khususnya hak masyarakat adat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah peneliti paparkan pada bab-bab terdahulu, maka beberapa temuan dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut, resistensi masyarakat adat Rendu terhadap pembangunan waduk lambo yaitu: Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat adat di desa Rendu Butowe sebagai lokasi pembangunan waduk Lambo, sosialisasi tentang rencana pembangunan waduk hanya dilakukan sekali saja, sehingga masyarakat tidak pernah mendapatkan informasi yang jelas tentang hak-haknya sebagai konsekuensi dari pembebasan lahan untuk pembangunan tersebut. Pendekatan kepada masyarakat yang kurang tepat, dalam rangka pembangunan waduk Lambo pemerintah daerah nagekeo hampir tidak ada pendekatan secara budaya kepada masyarakat adat Rendu Butowe, kecuali hanya berupa surat pemberitahuan untuk pengukuran lahan bagi pembangunan waduk Lambo. Hilangnya tempat tinggal sebagai basis kultural, sebagai dampak dari pembangunan waduk Lambo, masyarakat adat Rendu akan kehilangan tempat tinggal (rumah), tempat-tempat ritual adat, dan kuburan-kuburan nenek moyang. Tempat tinggal (rumah) merupakan satu kesatuan yang terpisahkan dengan diri mereka sendiri. Hilangnya lahan produktif, konsekuensi lain dari pembangunan waduk Lambo masyarakat adat Rendu Butowe akan kehilangan lahan produktif seperti sawah ladang, kebun dan tanaman-tanaman produktif seperti jambu mete, kelapa, yang selama ini sebagai sumber penghidupan mereka sebagai petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana. 2005. *Sisi Perkembangan Kota*. Yogyakarta:Laskbang Pressindo
- Awaliyah, R. 2017. *Resistensi Masyarakat dalam Pembangunan Waduk Kuningan*. Universitas Pendidikan Indonesia
- Eko Santoso. 2019. *Resistensi Warga Kemusu Terhadap Pembangunan Waduk Kebung Ombo 1985-2002*. Universitas Negeri Semarang
- Finda Octafiyanti. 2013. *Analisis Resistensi Masyarakat Terhadap Pembangunan Waduk Logung di Desa Kangdangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus*. Jateng
- Hutagalung, Aries S. 2005. *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*.Cetak 1. Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia. Jakarta
- Koetjaraningrat, 1977. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta:PT. Dian Rakyat
- Lexy J, Maleong. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosdakarya
- Marzali,Amri. 2005. *Antropologi dan Pembangunan Indonesia*. Jakarta:Pranada Media
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode –Metode Baru*. Jakarta: UIP
- Ma'u adi Sholih. 210. *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Dengan Cara Litigasi dan Non Litigasi*. Jakarta:Prestasi Pustakarya.
- Nurhajariri, Dwi Ratna, dkk. 2005. *Kerusuhan Sosial di Madura Kasus Waduk Nipa dan Ladang Garam*. Yogyakarta: Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan
- Scot, James. 2000. *Senjata Orang-Orang Kalah; Bentuk-Bentuk Resistensi Sehari-Hari Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Suriadi, a. 2005. *Resistensi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Pedesaan*. Jakarta: Universitas Indonesia

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta

Sukeni, Ni Nyoman. 2009. *Hegemoni Negara dan Resistensi Perempuan Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Bali*; Udayana University Press